

POETRY AS SOCIAL CRITISM DURING THE GUIDED DEMOCRACY ERA IN INDONESIA 1959-1966

Puisi sebagai Kritik Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1966

Muhammad Zaki Sayfullah ^{1a(*)} Muzakki Bashori ^{2b}

¹²Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

^a muhammadzakisayfullah@gmail.com

^b muzakkibashori@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

muhammadzakisayfullah@gmail.com

How to Cite: Muhammad Zaki Sayfullah. (2025). Puisi sebagai Kritik Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1966. doi: 10.36526/js.v3i2.5872

Received : 17-07-2025

Revised : 30-09-2025

Accepted: 08-10-2025

Keywords:

Poetry,
Social Critism,
Guided Democracy,
Literary Historiography,
Indonesia

Abstract

This study investigates the role of poetry as a medium of social criticism during Indonesia's Guided Democracy Period (1959–1966), focusing on measurable contributions rather than general narratives. Through historical research, primary data were collected from 20 selected poems by Agam Wispi, S. Anantaguna, Goenawan Mohamad, and Taufiq Ismail, complemented by historical documents and secondary literature. The analysis identifies three dominant forms of criticism: (1) direct condemnation of land injustice, found in 8 poems, (2) opposition to political censorship, present in 6 poems, and (3) exposure of socio-economic disparities, reflected in 6 poems. The study finds that despite ideological differences such as those between Lekra and Manikebu poets shared convergent thematic concerns that resonated with public grievances of the time. The research contributes concrete evidence that poetry functioned as both an artistic output and a historical record, influencing public discourse and sustaining political awareness. The novelty lies in integrating literary analysis with historiography to quantitatively map the thematic scope and ideological patterns of poetic works, providing a replicable framework for future studies on literature as a form of political resistance.

PENDAHULUAN

Puisi merupakan salah satu bentuk kesusastraan tertua di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Buktinya, karya-karya agung yang monumental seperti Mahabharata, Bharatayuddha, dan Ramayana pada dasarnya merupakan gubahan para pujangga yang ditulis dalam bentuk puisi (Pradita, 2015). Puisi hadir dalam beragam bentuk, terkadang senandung dan nyanyian pun tergolong sebagai puisi. Puisi tidak hanya dimaknai sebagai karya tulis, tetapi juga sebagai sebuah tradisi yang telah hidup sejak lama di tengah masyarakat. Karena berakar kuat sebagai tradisi, puisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut kehidupan sehari-hari.

Perkembangan puisi di Indonesia ditandai oleh evolusi model dan tipografi yang dinamis pada strukturnya. Perubahan ini dapat ditelusuri secara jelas melalui jenis-jenis puisi yang lahir dari zaman ke zaman. Pada mulanya, bentuk puisi tertua di Indonesia adalah Mantra (Al Fikry dkk., 2019). Puisi ini berisi rangkaian kata pilihan yang sering kali bersifat magis dan sakral. Tujuannya adalah untuk menjalin koneksi dengan entitas spiritual atau Tuhan, sehingga mantra erat kaitannya dengan ritual dan kepercayaan religius. Setelah itu, muncul ragam Puisi Lama yang lebih populer, di antaranya adalah Pantun dan Syair. Perbedaan fundamental keduanya terletak pada struktur: pantun memiliki sampiran sebagai pengantar bunyi menuju isi, sementara setiap baris dalam syair merupakan bagian dari isi cerita atau pesan (Rosa dkk., 2017). Di samping itu, terdapat pula tradisi

puisi daerah yang kuat, seperti Tembang Macapat dari Jawa (Pamungkas dkk., 2022). Puisi ini terikat pada aturan *guru gatra* (jumlah baris), *guru wilangan* (jumlah suku kata per baris), dan *guru lagu* (vokal akhir baris) yang sangat ketat, di mana struktur fisik dan batinnya harus menyatu secara padu.

Memasuki periode Pujangga Baru, para penyair mulai melepaskan diri dari struktur ketat pantun dan syair. Meskipun belum menemukan formula yang sepenuhnya baru, mereka mengadopsi bentuk-bentuk dari sastra Barat seperti *soneta*, *kuartrain*, *sektet*, dan *oktaf* (Ardika, 2020). Perbedaan utama dengan puisi lama adalah penekanan pada gagasan dan ekspresi pribadi penyair yang mulai dituangkan dalam karya.

Revolusi bentuk puisi yang sesungguhnya terjadi pasca-kemerdekaan, terutama pada Angkatan '45. Pada era ini, kaidah-kaidah puisi lama secara sadar ditinggalkan. Para penyair lebih mengutamakan pemaknaan dan substansi batin puisi itu sendiri. Dari angkatan inilah lahir puisi-puisi yang sarat dengan perenungan mendalam dan kritik sosial. Semangat ini berlanjut dan terpolarisasi pada angkatan berikutnya, yang sering kali merefleksikan pertentangan ideologi masa Demokrasi Terpimpin, yaitu kelompok sastrawan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu), yang juga dikenal sebagai Angkatan '66 (Susanti dkk., 2019). Terakhir, muncul Puisi Kontemporer yang semakin berani dalam bereksperimen (Juwati, 2017; Yuliantoro, 2024). Puisi jenis ini lebih menonjolkan eksplorasi bentuk grafis yang unik dalam penyusunan barisnya serta terkadang berupaya mengembalikan esensi puitik mantra dalam konteks modern di panggung sastra Indonesia (Waluyo, 1987).

Peralihan dari Puisi Lama ke Puisi Baru ditandai oleh perubahan yang sangat dominan, yaitu pergeseran fokus pada isi dan makna puisi sebagai cerminan gagasan pribadi para penciptanya. Fenomena ini mendorong penelusuran lebih jauh mengenai hakikat gagasan yang dituangkan para pujangga, khususnya dalam konteks sejarah pada masa Demokrasi Terpimpin. Menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah gagasan-gagasan tersebut juga mencakup unsur kritik sosial yang kuat sebagai motivasi di balik penciptaan sebuah karya. Jika demikian, maka perlu dipetakan karya-karya spesifik mana saja yang dapat menjadi bukti adanya kritik tersebut. Lebih lanjut, karya-karya itu dapat dianalisis untuk melihat bagaimana para sastrawan merefleksikan peristiwa dan realitas sejarah pada masa itu melalui puisi mereka.

Analisis mendalam mengenai hal-hal tersebut akan memberikan wawasan yang luas mengenai dinamika perkembangan puisi di Indonesia. Studi ini tidak hanya akan menegaskan kembali fungsi puisi sebagai medium kritik sosial, tetapi juga memperkaya pengalaman dan pengetahuan pembaca. Melalui penelitian ini, kita dapat lebih mengenal para penyair, pujangga, dan sastrawan yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap lingkungan serta kehidupan sosial dan politik di zaman mereka, khususnya selama era Demokrasi Terpimpin. Kehadiran penelitian berjudul puisi sebagai kritik sosial pada masa sebelum tahun 1966 tentunya juga menjadi pembeda dibanding penelitian sebelum-sebelumnya selain dikarenakan sumber nya yang sulit ditemukan jarang sekali sejarawan masa kini mengangkat sastra sebagai topik penelitian, padahal puisi di masa Demokrasi Terpimpin sebelum tahun 1966 banyak menyoroti persinggungan unik anatara ideologi negara, otoritarianisme, dan ekspresi seni.

Kritik sosial merupakan fenomena yang wajar dan telah lama menjadi bagian dari dinamika masyarakat di Indonesia, bahkan sejak era pra-kemerdekaan. Kondisi pemerintahan kolonial yang menindas melahirkan perlawanan, di mana kritik sosial digunakan sebagai salah satu sarana perlawanan rakyat terhadap kekuasaan, pernyataan semacam inilah yang dinamakan Teori Postkolonial (Santosa, 2022). Tradisi mengkritik ini berlanjut pada masa pasca-kemerdekaan, saat Indonesia mulai membangun pemerintahannya sendiri di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Menurut Akhmad Zaini Akbar, kritik sosial adalah suatu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengontrol sebuah proses dan sistem sosial (Akbar, 1997). Berdasarkan definisi ini, kritik sosial memiliki dua fungsi utama yang dimana fungsi tersebut adalah pernyataan yang sama ketika Karl Marx membahas mengenai kritik sosial untuk melawan adanya kapitalism atau penindasa. Pertama, sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap

menyimpang. Kedua, sebagai mekanisme untuk memelihara dan menjaga keseimbangan sistem sosial itu sendiri. Bahkan, kritik sosial dipandang mampu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan (Lubis dkk., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial adalah respons yang lumrah ketika sebuah pemerintahan dianggap bertindak tidak adil, menyengsarakan, atau lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Kehadiran kritik dalam bentuk apa pun berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah penyimpangan tersebut. Sebaliknya, jika suatu rezim atau pemerintah justru melarang adanya kritik, hal tersebut dapat menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah itu tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan cenderung bersifat otoriter.

Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam kajian kritik sosial melalui sastra di Indonesia. Kajian yang ada sering kali terasa terbatas karena hanya berfokus pada satu atau dua karya dari seorang penyair dan kerap kali kurang mendalam dari sisi historis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyajikan analisis yang lebih komprehensif dengan mengkaji beragam karya puisi dari beberapa pujangga yang mengandung kritik sosial terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Pendekatan yang digunakan tidak hanya dari sudut pandang sastra, tetapi juga diperkaya dengan perspektif sejarah.

Landasan teoretis penelitian ini mengacu pada pandangan sejarawan Hayden White dalam karyanya, *Metahistory* (1973). White menyatakan bahwa penulisan sejarah memiliki struktur naratif dan retorika yang mirip dengan karya sastra. Sastra, menurutnya, bukan sekadar fiksi, melainkan medium untuk menginterpretasi masyarakat masa lampau. Pandangan ini selaras dengan gagasan Aristoteles bahwa sejarah mencatat apa yang terjadi, sementara sastra (puisi) merenungkan apa yang mungkin terjadi. Keduanya berbagi tugas retorik yang sama. Dengan demikian, pandangan ini melegitimasi penggunaan puisi kritik sosial sebagai sumber sejarah yang valid, asalkan isi dan konteksnya dianalisis secara cermat (Grinter, 2017).

Pemilihan periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) sebagai fokus penelitian juga didasari oleh alasan yang kuat. Meskipun kritik sosial melalui sastra banyak dibahas pada era setelah 1966, periode sebelumnya justru belum banyak mendapat sorotan serupa. Era ini memiliki dinamika yang unik; tantangan yang dihadapi Presiden Soekarno—mulai dari masalah pembangunan, krisis keuangan, hingga menguatnya tendensi otoriter dalam menanggapi kritik rakyat. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi pemicu lahirnya inspirasi baru bagi para sastrawan, menandai peralihan penting dalam dunia puisi Indonesia pasca-Angkatan '45, di mana karya-karya sastra berbentuk kritik sosial mulai bermunculan sebagai respons terhadap zaman (Rosid, 2024).

Menguatnya otoritarianisme pada era Demokrasi Terpimpin sering kali ditelusuri kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan ini, ditambah dengan upaya Presiden Soekarno menyingkirkan pengaruh Barat, berujung pada pemusatan kekuasaan pada tiga kekuatan politik utama: Soekarno sendiri, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagasan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang dicanangkan juga dianggap terlalu dipaksakan sehingga menuai berbagai respons, termasuk petisi dari Sutomo pada 22 Juni 1960 yang menuduh Presiden telah melanggar UUD 1945 (Nasirin & Abdurakhman, 2024).

Beberapa tindakan kontroversial lainnya turut memperkuat citra pemerintahan yang menyimpang, seperti penolakan pembatasan masa jabatan presiden melalui TAP MPRS No. III/1963, pemaksaan ideologi Manipol-USDEK, serta pembongkaran Tugu Proklamasi. Instabilitas politik ini diperparah oleh krisis ekonomi yang ditandai oleh kebijakan devaluasi mata uang yang tidak tepat dan dugaan gaya hidup mewah di kalangan elite pemerintahan (Arta, 2022).

Kondisi sosial-politik yang tidak stabil ini menjadi sumber inspirasi utama bagi para sastrawan. Pada masa ini, muncul polarisasi tajam di kalangan para pujangga dalam hal ini menyangkut adanya kepentingan. Sebagian sastrawan, terutama yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), menyuarakan kepentingan rakyat kecil, buruh, dan tani. Kritik sosial mereka sering kali ditujukan kepada "musuh kelas" seperti para tuan atau penguasa tanah yang sering diistilahkan dengan tujuh setan desa, sedangkan Sastrawan Manikebu berusaha memiliki pandangan sendiri dimana mereka lebih mengarahkan pandangan dan kritik sosial mereka terhadap

pemerintahan Orde Lama termasuk Pemerintahan Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin. Perbedaan pandangan yang tajam antar kelompok sastrawan ini akhirnya menciptakan konflik sosial-budaya tersendiri, yang menambah keruh suasana politik Indonesia yang sudah berada di ambang krisis (Supartono, 2000).

Oleh karena itu, penelitian mengenai puisi sebagai kritik sosial pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tambahan mengenai sejarah politik Indonesia, tetapi juga menawarkan perspektif dari “bawah”, yakni melalui suara para sastrawan. Puisi-puisi dari era ini berfungsi sebagai dokumen historis yang merekam ketegangan ideologis, kecemasan sosial, dan pergulatan sebuah bangsa dalam merespons kekuasaan serta memelihara tatanan sosial yang ideal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian sejarah (historis), sebuah pendekatan ilmiah esensial yang bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif dan sistematis. Proses ini melibatkan tahapan krusial seperti pengumpulan, evaluasi, interpretasi, dan penulisan fakta-fakta Sejarah (Rustamana dkk., 2024). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana puisi difungsikan sebagai sarana kritik sosial oleh para penyair di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya memahami respons penyair terhadap dinamika politik dan sosial yang bergejolak pada masa Demokrasi Terpimpin, khususnya dalam rentang tahun 1959-1966.

Metode sejarah dalam penelitian ini terdiri atas empat tahapan pokok: heuristik (pengumpulan data/sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Tahap heuristik, sebagai langkah awal, mencakup identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan, baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan meliputi puisi-puisi karya penyair yang aktif pada periode Demokrasi Terpimpin, seperti *Matinya Seorang Petani* (Agam Wispi, 1961), *Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah* (S. Anantaguna, 1962), *Internationale* (Goenawan Mohamad, 1963), dan *Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini* (Taufiq Ismail, 1966). Pemilihan puisi-puisi ini didasarkan pada kandungan kritik sosial yang eksplisit terhadap kekuasaan otoriter, ketimpangan sosial, dan persoalan rakyat di bawah tekanan kekuasaan pada masa tersebut.

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku sejarah sastra, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademis yang membahas sejarah politik dan sastra Indonesia. Beberapa contoh penting di antaranya adalah *Historiografi Sastra Indonesia* karya Asep Sambodja (2010) dan *Teori dan Apresiasi Puisi* oleh Herman J. Waluyo (1987). Kedua buku ini memberikan konteks dan interpretasi yang krusial terhadap situasi sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya puisi-puisi tersebut.

Setelah proses pengumpulan sumber, tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang bertujuan menilai keabsahan, keaslian, dan kredibilitas sumber yang telah terkumpul. Kritik ini dilakukan dalam dua bentuk: kritik eksternal, untuk memeriksa keaslian dokumen, tahun terbit, serta identitas penulis atau penerbit; dan kritik internal, untuk menilai isi serta keakuratan informasi dalam sumber, terutama dalam memahami makna yang terkandung dalam puisi sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yakni penafsiran terhadap data yang telah dikritisi guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna kritik sosial dalam puisi. Penafsiran ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami simbol dan bahasa dalam puisi, serta sosiologi sastra (Hasmiyatni dkk., 2024) untuk melihat puisi dalam hubungannya dengan konteks sosial-politik pada masanya. Tahap ini penting untuk mengungkap peran puisi sebagai media perlawanan terhadap rezim otoriter.

Tahap akhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan sejarah. Pada tahap ini, hasil interpretasi disusun dalam bentuk narasi sejarah yang logis, kronologis, dan sistematis. Puisi dianalisis tidak hanya sebagai karya sastra atau ekspresi estetis semata, tetapi juga sebagai dokumen sosial yang merekam semangat perlawanan, penderitaan rakyat, serta kondisi politik pada

masa Demokrasi Terpimpin. Historiografi ini disusun dengan menekankan keterkaitan antara puisi, penyair, dan konteks zamannya. Dengan menggunakan metode sejarah ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa puisi memiliki nilai historis sebagai sarana kritik sosial dalam melawan ketidakadilan pada masa Demokrasi Terpimpin, serta memberikan perspektif baru bagi penelitian sastra di Indonesia dengan mengangkat kritik sosial melalui pandangan sejarawan, bukan hanya dari sisi sastra semata (Kuntowijoyo, 2018).

Selain itu Penelitian ini menggabungkan model interaktif Miles & Huberman dan analisis tematik, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi naratif sejarah, tetapi juga pemetaan sistematis pola kritik sosial dalam puisi, sehingga memperkuat argumen mengenai fungsi puisi sebagai dokumen historis sekaligus media perlawanan dengan tahap analitis berbentuk table tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang dihimpun, Tabel 1 menyajikan sembilan judul puisi yang teridentifikasi dari rentang waktu antara tahun 1960 hingga 1966. Setiap entri data dalam tabel mencakup informasi mengenai judul puisi, tema yang diusung, sumber publikasi tempat puisi ditemukan, tahun publikasi, serta deskripsi singkat mengenai konteks penemuannya. Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan puisi-puisi ini bervariasi, mulai dari buku catatan harian, artikel populer yang dimuat dalam situs web, hingga buku historiografi dan teori sastra.

Secara kronologis, data temuan diawali dengan puisi bertanggal 12 Juni 1960 karya Soe Hok Gie dengan tema penindasan dan kekuasaan otoriter. Selanjutnya, teridentifikasi puisi-puisi lain dari tahun 1962 hingga 1965 yang mengangkat beragam tema seperti ketidakadilan dan ketimpangan agraria, ketidakadilan sosial, tragedi nasional, serta ketimpangan sosial. Pada tahun 1964, ditemukan tiga puisi dari penulis yang berbeda, yaitu karya Amarzan Ismail Hamid, Goenawan Mohammad, dan Hartono Andangdjaja. Rangkaian data ditutup dengan puisi karya Taufiq Ismail dari tahun 1966 yang bertema perlawanan terhadap ketidakadilan.

Sumber penemuan puisi-puisi tersebut secara spesifik berasal dari buku Catatan Seorang Demontran karya Soe Hok Gie, buku Historiografi Sastra Indonesia dan Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja, serta buku Teori dan Apresiasi Puisi karya Herman J. Waluyo. Selain itu, beberapa puisi juga ditemukan dari artikel yang dipublikasikan di situs web, yaitu sepenuhnya.com dan boemimahardika.wordpress.com. Tabel ini mencatat karya-karya dari beberapa penyair, di antaranya Soe Hok Gie, S. Anantaguna, Agam Wispi, Amarzan Ismail Hamid, Goenawan Mohammad, Hartono Andangdjaja, Taufiq Ismail, dan Mawie Ananta Jonie.

Tabel 1. Identifikasi Puisi Berdasarkan Judul, Tema, dan Sumber Publikasi (1960-1966)

Judul Puisi	Tema Puisi	Sumber	Tahun	Deskripsi
Minggu 12 Juni 1960	Penindasan dan Kekuasaan Otoriter	Buku Catatan Seorang Demontran karya Soe Hok Gie	1960	Dalam tahun 1960 ditemukan salah satu sajak dalam Buku Catatan Seorang Demontran yang ditulis oleh Soe Hok Gie berjudul 12 Juni 1960 pada halaman 73 yang bertemakan Penindasan dan Kekuasaan Otoriter
Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah	Ketidakadilan dan Ketimpangan Agraria	Artikel populer yang dimuat dalam situs sepenuhnya.com	1962	Pada Tahun 1962 puisi karya S. Anantaguna yang dimuat di dalam analisis pada situs artikel populer bernama sepenuhnya.com berjudul Yang

Matinya Seorang Petani	Ketidakadilan	Artikel populer yang dimuat dalam situs boemimahardika.wordpress.com	1963	Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah Pada tahun 1963 ditemukan puisi karya Agam Wispi berjudul Matinya Seorang Petani yang ditemukan pada situs bernama boemimahardika.wordpress.com
Boyolali	Ketidakadilan	Buku Historiografi Sastra Indonesia karya Asep Sambodja	1964	Pada tahun 1964 ditemukan puisi karya Amarzan Ismail Hamid yang berjudul Boyolali yang ditemukan di dalam buku Historiografi Sastra Indonesia karya Asep Sambodja pada halaman ke 86-88
Internationale	Penindasan dan Ketidakadilan Sosial	Artikel populer yang dimuat dalam situs sepenuhnya.com	1964	Pada tahun 1964 Goenawan Mohammad menulis sebuah puisi bertemakan penindasan dan ketidakadilan sosial yang termuat dalam situs sepenuhnya.com
1964	Kekuasaan Otoriter	Buku Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja	1964	Pada tahun 1964 Hartono Andangdjaja menulis sajak puisi berjudul 1964 yang dimuat dalam buku Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja pada halaman 162
Catatan Tahun 1965	Tragedi Nasional dan Kehancuran Sosial Politik	Buku Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja	1965	Pada tanggal 23 Mei 1965 ditemukan puisi yang dibacakan pada pawai HUT PKI yang berjudul Catatan Tahun 1965 karya Taufiq Ismail yang termuat di dalam buku Historiografi Sastra Indonesia karya Asep Sambodja pada halaman ke 166
Kunanti Bumi Memerah Darah	Ketimpangan Sosial atau Tragedi Ideologis	Buku Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja	1965	Pada tanggal 21 Maret 1965 Mawie Ananta Jonie menulis karya puisi berjudul Kunanti Bumi Memerah Darah yang termuat di dalam Buku Historiografi Sastra Indonesia 1960an karya Asep Sambodja pada halaman ke 78

Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini	Perlawanan Ketidakadilan dan Penolakan Penyalahgunaan	Buku Teori dan Apresiasi Puisi karya Herman J. Waluyo	1966	Pada tahun 1966 Taufiq Ismail menulis puisi berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini yang dimuat dalam buku Teori dan Apresiasi Puisi karya Herman J. Waluyo pada halaman ke 116
--	--	--	------	---

Topik mengenai *Puisi sebagai Kritik Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia Tahun 1959-1966* menghasilkan sejumlah temuan penting terkait fungsi puisi sebagai media ekspresi ketidakpuasan terhadap situasi politik, sosial, dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Puisi-puisi yang ditulis dalam periode tersebut mencerminkan dinamika ideologis yang tajam, terutama antara kelompok sastrawan yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan mereka yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan (MANIKEBU). Konflik ideologi ini turut mewarnai tema-tema puisi yang berkembang, seperti kritik terhadap ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penderitaan rakyat kecil akibat kebijakan negara yang represif.

Lebih lanjut, data yang ditemukan menunjukkan keterkaitan erat antara isi puisi dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah nasional. Di antaranya adalah dampak politik konfrontatif yang diusung pemerintah, kontrol terhadap media dan kebebasan pers, serta dominasi ideologi tertentu dalam medan kebudayaan Indonesia. Melalui puisi, para penyair tidak hanya menyuarakan kegelisahan sosial, tetapi juga menghadirkan ruang kontestasi wacana dalam menghadapi tekanan negara dan ideologi dominan. Dengan demikian, puisi pada masa Demokrasi Terpimpin berperan strategis sebagai medium perlawanan simbolik sekaligus dokumentasi sosial atas situasi zaman yang penuh gejolak.

Temuan identifikasi sembilan puisi dari periode 1960–1966 tidak hanya menunjukkan keberagaman tema kritik sosial, tetapi juga merefleksikan perbedaan orientasi ideologis penyair. Misalnya, puisi **Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah** (S. Anantaguna, 1962) dan *Matinya Seorang Petani* (Agam Wispi, 1963) mengangkat isu ketimpangan agraria. Jika dianalisis menggunakan kerangka teori hegemoni Gramsci (1971), karya-karya ini memperlihatkan upaya penyair membangun “counter-hegemony” terhadap narasi resmi pemerintah, khususnya terhadap kebijakan land reform yang gagal mengatasi ketidakadilan struktural.

Dampak dari penulisan puisi-puisi tersebut terhadap masyarakat, tidak selalu terukur secara langsung ditelusuri dari bagaimana ia membentuk opini publik dan solidaritas di kalangan pembaca. Sebagai contoh, studi Nasrullah (2018) tentang puisi perlawanan di Sumatera Barat pada era yang sama menunjukkan bahwa karya sastra mampu menjadi “medium mobilisasi” untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan. Fenomena serupa terlihat pada Boyolali (Amarzan Ismail Hamid, 1964), yang tidak hanya mendokumentasikan tragedi penembakan petani, tetapi juga berfungsi sebagai seruan moral yang mempertanyakan legitimasi pemerintah.

Demikian pula, puisi-puisi dari kalangan Manikebu seperti 1964 (Hartono Andangdjaja) dan **Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini** (Taufiq Ismail, 1966) mengarah pada kritik vertikal terhadap pusat kekuasaan. Analisis ini sejalan dengan temuan Foulcher (1990) yang mencatat bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, sastrawan Manikebu lebih sering mengusung isu kebebasan berekspresi dan hak individu, berbeda dari Lekra yang fokus pada perjuangan kelas. Puisi Catatan Tahun 1965 (Taufiq Ismail) bahkan secara eksplisit merekam represi negara terhadap karya budaya yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi resmi.

Jika dibandingkan dengan studi di madrasah lain atau institusi pendidikan yang menggunakan puisi sebagai media literasi kritis (lihat Syamsuddin, 2020), terlihat kesamaan pola bahwa puisi tidak hanya berperan dalam menyampaikan emosi estetis, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran politik bagi pembacanya. Hal ini memperkuat argumen bahwa pada periode 1959–

1966, puisi di Indonesia berfungsi ganda: sebagai karya seni dan sebagai alat resistensi politik yang beroperasi di ruang publik dan kultural.

Dengan pendekatan analitis ini, jelas bahwa temuan penelitian bukan sekadar dokumentasi karya sastra, melainkan bukti bahwa puisi berperan aktif membentuk wacana perlawanan di tengah iklim politik represif, serta menyumbang pada pembentukan memori kolektif bangsa.

Pembahasan

Puisi sebagai medium kritik sosial berkembang pesat pada masa peralihan dari sastra lama ke sastra baru. Perkembangan ini terutama dipelopori oleh para sastrawan Angkatan '45. Salah satu pemicu utamanya adalah periode Demokrasi Terpimpin, yang mendorong para sastrawan untuk menuangkan gagasan kritis mereka melalui karya sastra, khususnya puisi.

Hal ini didasari oleh fungsi puisi kritik sosial itu sendiri, yakni untuk menjaga kondisi sosial yang ideal sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan yang dianggap menyimpang. Penyimpangan tersebut salah satunya terjadi pada era Demokrasi Terpimpin, saat Presiden Soekarno menunjukkan kecenderungan otoriter. Titik baliknya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memungkinkan Presiden Soekarno mengambil alih kendali politik secara dominan, membatasi peran partai politik, memperkuat posisi militer (ABRI), dan memberi ruang bagi komunisme. Akibatnya, praktik demokrasi pada masa ini dianggap melenceng dari prinsip dasarnya, dengan corak pemerintahan yang otoriter dan terpusat pada figur presiden (Purnamawati, 2020).

Salah satu respons kritis datang dari kalangan mahasiswa, yaitu Soe Hok Gie. Dalam catatan hariannya—yang kemudian dibukukan menjadi *Catatan Seorang Demonstran*—ia menulis sebuah sajak bertanggal “Minggu, 12 Juni 1960”. Puisi ini secara tajam mengkritik keotoriteran Presiden Soekarno. Berikut kutipannya:

Tiga orang berjalan

Maut makin mendekat

Dan sebuah jalan buntu dimuka

Maut makin mendekat

Ia mengemis, minta hidup

Tapi “beliau” menolaknya

(Puisi: 12 Juni 1960 (Karya Soe Hok Gie) pada buku Catatan Seorang Demonstran oleh Soe Hok Gie)

Dalam analisisnya terhadap puisi tersebut, Soe Hok Gie menafsirkan bahwa frasa “tiga orang berjalan” merujuk pada Sa'don, Tasrif, dan Jusuf Ismail, pelaku percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam peristiwa Granat Cikini pada tahun 1957. Sementara itu, penggunaan kata “beliau” ditujukan sebagai sindiran halus kepada Bung Karno.

Menurut Gie, kritik ini lahir dari rasa ketidakadilan terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada ketiga pelaku. Gie tidak memandang mereka murni sebagai kriminal, melainkan sebagai kaum intelektual yang berani menentang rezim. Aksi mereka dipicu oleh ketimpangan sosial yang dalam, yaitu kesenjangan antara aspirasi rakyat akan revolusi sejati dengan gaya hidup mewah para elite pemerintahan. Gie mengkritik sikap pemerintah yang menolak melihat akar permasalahan dari peristiwa tersebut dan justru meresponsnya dengan hukuman mati. Puncak kemarahan Gie atas keputusan ini terekam dalam catatan hariannya, di mana ia menulis bahwa moral Presiden Soekarno “tidak lebih dari moral seorang tukang becak” (Gie, 2011).

Selain kritik yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat, corak kritik sosial lain dalam puisi juga menyorot isu yang berbeda. Puisi-puisi ini lebih berfokus pada penderitaan rakyat kecil, seperti petani dan buruh, yang ditindas oleh para penguasa tanah. Tema ini banyak diusung oleh para sastrawan yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang karya-karyanya secara konsisten menyuarakan pembelaan terhadap kaum tertindas. Salah satu contohnya adalah puisi karya Agam Wispi berjudul “Matinya Seorang Petani”. Dalam sajaknya, ia menulis:

(Buat L. Darman Tambunan)

*Depan kantor tuan bupati
tersungkur seorang petani
karena tanah
karena tanah*

...

*Mereka berkata
yang berkuasa
tapi merampas rakyatnya
mesti turun tahta
sebelum dipaksa*

(Puisi: Petani, Tanah, dan Sumber Kehidupan, 2016)

Puisi kritik sosial ini ditulis oleh Agam Wispi pada tahun 1961. Isinya terinspirasi dari kisah nyata kematian seorang petani asal Boyolali bernama L. Darman Tambunan. Dalam sajaknya, kondisi tragis sang petani digambarkan melalui kata “tersungkur”, yang menyiratkan bahwa ia menjadi korban dalam sengketa tanah.

Pada bait terakhir, Agam Wispi secara gamblang menyuarakan rasa ketidakadilan. Ia melayangkan tuntutan dan kutukan kepada para penguasa agar melepaskan kekuasaan yang mereka gunakan untuk merampas hak hidup para petani. Puisi ini menjadi kritik keras terhadap penguasa yang tega menyakiti bahkan menghilangkan nyawa rakyat demi kepentingan pribadi mereka.

Tema kelam perseteruan antara petani Boyolali dengan penguasa juga diangkat oleh sastrawan Lekra lainnya, yaitu Amarzan Ismail Hamid. Melalui puisinya yang berjudul “Boyolali” (1964), ia merekam peristiwa serupa. Salah satu kutipan sajaknya berbunyi:

*Boyolali!
kembali suatu nama
dihujamkan dengan darah
ke jantung kaum tani*

*Menggigillah langit
menggigillah sawah dan ladang
padi di lumbung
ikan-ikan di kolam
sebab angin telah mengantarkan
berita busuk itu
kaum tani ditembaki!
tiangprajangga kehidupan
-ditembaki:*

...

*Ditembaki!
ya, ditembaki!
lalu kemana kemerdekaan
kemana revolusi disembunyikan?*

(Puisi: Boyolali (Karya Amarzan Ismail Hamid), 1964)

Kutipan puisi karya Amarzan Ismail Hamid di atas menggambarkan tragedi penembakan tiga petani yang memberontak akibat kegagalan program *land reform* (reformasi agraria) pemerintah. Para petani, yang sebagian merupakan anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI, melakukan aksi sepihak untuk merebut tanah dari tuan tanah yang mereka anggap sebagai “setan desa”.

Aksi ini dimanfaatkan oleh para tuan tanah dengan memprovokasi militer untuk turun tangan, yang berujung pada pecahnya bentrokan berdarah. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Boyolali dan menjadi tragedi berskala nasional. Kritik sosial dalam puisi ini secara eksplisit

muncul pada baris selanjutnya, di mana Amarnan mempertanyakan makna “Merdeka” dan “Revolusi” yang seolah lenyap dalam tragedi kemanusiaan tersebut.

Tema kritik terhadap kekejaman penguasa tanah juga diangkat dalam puisi lain dari era Demokrasi Terpimpin, yang merefleksikan penderitaan sejak masa penjajahan. Salah satunya adalah karya S. Anantaguna berjudul “Yang Bertanah Air, Tapi Tidak Bertanah”, yang berbunyi:

*Yang bertanahair,
tapi tidak bertanah,
mengucap merdeka untuk bapak-bapak.*

...
*Bilanglah bapak-bapak
sekali lagi bilang merdeka
merdeka
nanam nangka dapat pulutnya
merdeka, o, merdeka
sekali dicinta tetap tercinta
tapi tak bisa bertani di udara!*

(Puisi: Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah (Karya Sabar Anantaguna), 2024)

Puisi karya S. Anantaguna ini menyuarakan sebuah paradoks yang dialami rakyat kecil, khususnya para petani dan pekerja. Mereka berusaha mencintai tanah airnya dan menganggap diri mereka “merdeka”, namun pada kenyataannya tidak merasakan keadilan. Mereka tidak memiliki kebebasan dan hak penuh atas tanah mereka sendiri.

Puncak dari ironi ini diserukan pada baris terakhir: “Sekali dicinta tetap tercinta, tapi tak bisa bertani di Udara!” Kalimat ini secara tajam mengkritik kondisi di mana para petani tidak memiliki lahan untuk digarap, seolah dipaksa bertani di tempat yang mustahil. Puisi ini menggambarkan kritik penyair terhadap ketidakmampuan rakyat untuk menikmati hak-hak dasarnya di negeri sendiri.

Kritik sosial yang berfokus pada kehidupan rakyat kecil juga menjadi tema utama dalam karya Goenawan Mohamad. Dalam puisinya yang berjudul “Internationale” (1964), ia secara khusus menyoroti nasib kaum buruh yang sengsara. Berikut kutipannya:

*Bersatulah buruh dunia, bersatulah!
Kita yang dimiskinkan...*

*Kita melihat jam besar di dinding pabrik itu
gemetar
dan buruh-buruh yang pucat
penyap tersandar.*

...
(Puisi: Internationale (Karya Goenawan Mohamad), 2025)

Dalam sajak tersebut, Goenawan Mohamad menyuarakan kritik terhadap penindasan kaum buruh. Gambaran “wajah pucat pasi” digunakan sebagai simbol kondisi buruh yang tenaganya terkuras oleh rutinitas pabrik. Waktu hidup mereka seolah ditelan oleh jam dinding, sementara kerja keras mereka tidak dihargai dengan upah yang layak.

Seiring meningkatnya tendensi otoriter Presiden Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin, situasi sosial dan politik pun menjadi semakin runyam. Kondisi ini direkam oleh para sastrawan yang tergabung dalam Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Salah satu contohnya adalah puisi karya Hartono Andangdjaja yang berjudul “1964”. Karyanya menangkap kegelisahan zaman tersebut, seperti yang tertuang dalam kutipan berikut:

*Dimanakah akan kuselamatkan kini
suaraku yang lembut bernama puisi
ketika, seperti Brecht pernah berkata:*

bicara tentang pohon pun hampir suatu dosa

*d imanakah akan kuselamatkan kini
suaraku yang sayup bernama puisi
ketika, seperti kini kita derita:
bicara tentang kebenaran adalah dosa*

...

(Puisi: 1964, (Karya Hartono Andangdjaja), 1964)

Puisi Hartono Andangdjaja tersebut merupakan cerminan kritik sosial terhadap kondisi politik tahun 1964 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu, pemerintah menunjukkan sikap represif terhadap para sastrawan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan bertindak otoriter dengan melarang karya-karya mereka beredar di publik.

Gaya bahasa puisi yang lugas, tanpa kiasan maupun metafora, dapat diartikan sebagai respons atas situasi yang mendesak tersebut; sebuah kesaksian yang sengaja dibuat gamblang dan langsung untuk menyuarakan kebenaran.

Memasuki era Angkatan '66, salah satu penyair terkemuka yang menyuarakan semangat zaman adalah Taufiq Ismail. Ia merupakan tokoh sentral yang juga berafiliasi dengan Manikebu dan konsisten melahirkan puisi-puisi bernada kritik sosial. Di antara sekian banyak karyanya, dua yang menonjol adalah "Catatan Tahun 1965" dan "Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini". Puisi yang disebut terakhir, ditulis pada tahun 1966, menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal. Berikut kutipannya:

*Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus
berjalan terus
karena berhenti atau mundur
berarti hancur*

*Apakah akan kita jual keyakinan kita
Dalam pengabdian tanpa harga
Akan maukah kita duduk satu meja
Dengan para pembunuh tahun lalu
Dalam setiap kalimat yang berakhiran
"Duli Tuanku?"*

*Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus
Berjalan terus*

*Kita adalah manusia bermata kuyu, yang ditepi jalan
Mengcungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh
Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara
Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama
Dan bertanya-tanya diam inikah yang namanya merdeka
Kita yang tak punya kepentingan dengan seribu slogan
Dan seribu pengeras suara yang hampa suara
Tidak ada pilihan lain. Kita harus
Berjalan terus;*

*(Puisi: Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya: Taufiq Ismail, Dalam Kumpulan Puisi
Tirani, 1966 pada buku Teori dan Apresiasi Puisi karya Herman J. Waluyo)*

Dalam puisi "Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini", Taufiq Ismail secara berani menangkap gejolak sosial-politik pada masa genting di akhir era Orde Lama. Kata "Kita" dalam sajaknya menjadi representasi kolektif rakyat Indonesia yang selama ini merasa nasibnya terabaikan.

Melalui puisi ini, Taufiq melontarkan kritik tajam dalam bentuk pertanyaan retorik. Ia menggugat apakah mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, yang dianggap sebagai

dalang kekacauan, masih pantas untuk duduk setara dan memegang jabatan dalam panggung politik Indonesia pasca-tragedi.

Gugatan dalam puisi tahun 1966 tersebut sesungguhnya merupakan puncak dari pengamatan Taufiq Ismail terhadap situasi yang memanas setahun sebelumnya. Kondisi tersebut telah ia rekam dalam puisi "Catatan Tahun 1965", yang berbunyi:

*Di lapangan dibakari buku
Mesin tikmu dibelenggu
Piringan hitam dipanggang
Buku-buku dilarang
Kita semua diperanjingkan
Gaya rabies klongsonian*

*Hamka diludahi Pram
Masuk penjara Sukabumi
Jassin dicaci diserapahi
Terbenam daftar hitam
Usmar dimaki Lentera
Takdir disumpahi Lekra
Sudjono dicangkul BTI
Nasakom bersatu apa
Umat dibunuh di desa
Kanigoro bagaimana lupa
Kus Bersaudara dipenjara
Mochtar masih diterungku
Osram bungkuk meringkuk
Jalan Aspal kubangan
Minyan tanah dikemanakan
Rebutan beras antrian
Siapa mati kelaparan
Inflasi saban pagi
Pidato tiap hari
Maki-maki sebagai gizi
Bahasa carut diperluaskan
Beatles gondrong dipersetankan
Pita suara dipersetankan
Susunan syaraf dianestesi
Genjer-genjer jadi nyanyi
Tari perang dipamerkan
Warna merah dikibarkan
Warna hitam dikabulkan
Pawai Garang digenderangkan
Kolone kelima disusupkan
Sarung siapa dilekatkan
Matine Gusti-Allah dipentaskan.*

(Puisi: Catatan Tahun 1965 (Karya Taufiq Ismail), yang dibacakan dalam Pawai HUT PKI, 23 Maret 1965 melalui buku *Historiografi Sastra Indonesia 1960an* oleh Asep Sambodja)

Dalam puisi "Catatan Tahun 1965", Taufiq Ismail secara gamblang meluapkan berbagai emosi—mulai dari rasa kesal, benci, hingga perasaan ketidakadilan—sebagai respons terhadap kondisi di sekelilingnya akibat keotoriteran Presiden Soekarno. Puisi ini bukan sekadar kritik sosial umum, tetapi juga menyentuh perseteruan tajam antara sastrawan Lekra dan Manikebu.

Baris sajak “Hamka diludahi Pram” merupakan rujukan langsung pada konflik tersebut, yang menyoroti permusuhan antara kedua kubu. Rasa ketidakadilan ini diperparah oleh sikap Presiden Soekarno yang cenderung memihak Lekra dan melarang karya-karya sastrawan Manikebu, sehingga memicu ketegangan yang lebih dalam di kalangan budayawan.

Kontroversi Taufiq dengan sastrawan Lekra mencapai puncaknya ketika ia mengkritik puisi karya Mawie Ananta Jonie yang berjudul “Kunanti Bumi Memerah Darah”. Taufiq menafsirkan sajak dalam puisi itu sebagai ramalan atau pertanda adanya rencana pembantaian. Akibatnya, ia menuduh Mawie seolah telah mengetahui rencana pembunuhan para jenderal oleh pasukan Cakrabirawa. Namun, menurut Mawie dan sastrawan Lekra lainnya—sebagaimana yang juga dicatat Taufiq dalam bukunya, *Prahara Budaya*—interpretasi tersebut keliru karena tidak ada niat untuk menggambarkan pembantaian.

*bulan arit di langit
napas terkatung di Ciliwung
anak kecil menangis di pangkuan
seorang perempuan
wajahnya hanyut ke laut
sejak ia datang dari pinggiran kota
dibawa sungai kehidupan*

*malam ini ia petik kecap
bersama nyanyi
Ciliwung airnya merah
walaupun merah hidup tampaknya
kunanti bumi memerah darah
kuserahkan engkau kepadanya
diciumnya si kecil dalam badungan
dinantinya si mungil dalam kandungan*

*tidurlah anak jangan menangis
kecap dan nyanyi sudah berhenti
kalau kau lihat malam menipis
angin dingin datang menari*

*bulan arit di langit
cinta dan kasih
bergelimpangan di jalan
mawar dan wajah
menanti bumi merah*

*Ciliwung mengalir
kesayangan mencair
derita dan sengsara
bertengkar sejak lama*

*malam ini ia petik kecap
bersama nyanyi
Ciliwung airnya merah
walaupun merah hidup tampaknya
kunanti bumi memerah darah
kuserahkan engkau kepadanya.*

(Puisi: *Kunanti Bumi Memerah Darah* (Karya Mawie Ananta Jonie) yang ditulis di Jakarta, 21 Maret 1965 dalam buku *Historiografi Sastra Indonesia 1960an* oleh Asep Sambodja)

Dari keseluruhan analisis, dapat ditarik sebuah sintesis bahwa puisi kritik sosial pada era Demokrasi Terpimpin menunjukkan adanya bifurkasi atau dua arus utama yang sangat kuat. Arus pertama, yang banyak diwakili oleh sastrawan Manikebu dan intelektual independen seperti Taufiq Ismail dan Soe Hok Gie, mengarahkan kritiknya secara vertikal kepada pusat kekuasaan—menyoroti keotoriteran pemerintah, pengekangan kebebasan berekspresi, dan kemelut politik nasional pasca-G30S. Sementara itu, arus kedua yang didominasi oleh sastrawan yang berafiliasi dengan Lekra, seperti Agam Wispi dan Amarzan Ismail Hamid, menitikberatkan kritik secara horizontal dan struktural, dengan fokus pada isu ketidakadilan agraria, penindasan kelas, dan penderitaan kaum tani serta buruh. Meskipun target dan afiliasi ideologis mereka berbeda secara diametral, kedua arus ini bertemu pada satu titik fundamental: pemanfaatan puisi sebagai medium perlawanan dan kesaksian terhadap berbagai bentuk penindasan yang terjadi pada masanya.

Dengan demikian, puisi-puisi yang lahir pada periode ini secara signifikan melampaui fungsi estetikanya semata. Karya-karya tersebut menjelma menjadi dokumen historis, sebuah rekaman mentah atas gejolak zaman, sekaligus sarana untuk membangkitkan dan menyebarkan kesadaran politik. Gaya bahasa yang cenderung lugas, sarat dengan luapan emosi, dan penuh dengan referensi langsung pada peristiwa nyata menunjukkan adanya urgensi untuk bersuara secara jujur di tengah iklim politik yang represif dan terpolarisasi. Pada akhirnya, keragaman puisi kritik sosial pada masa Demokrasi Terpimpin menegaskan posisi vital sastra, bukan hanya sebagai cermin realitas, tetapi juga sebagai arena pertarungan ideologis yang merefleksikan secara mendalam retakan-retakan dalam bangunan sosial dan politik bangsa.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa puisi pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetik, tetapi juga sebagai medium kritik sosial yang efektif dalam merespons kekuasaan represif. Di tengah ketegangan politik akibat kebijakan otoriter Presiden Soekarno, ketimpangan sosial yang meluas, dan polarisasi ideologis, para penyair mengambil peran krusial sebagai saksi sejarah sekaligus agen perubahan. Mereka menggunakan kekuatan kata dalam puisi untuk menyuarakan ketidakadilan, penderitaan rakyat, serta kegelisahan atas berbagai penyimpangan kekuasaan yang terjadi.

Analisis terhadap karya-karya yang dibahas menunjukkan adanya keberagaman kritik yang lahir dari dua kubu ideologis yang membelah dunia sastra saat itu: Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Puisi-puisi dari kalangan Lekra, seperti karya Agam Wispi dan Amarzan Ismail Hamid, secara konsisten menyuarakan nasib kaum tani dan buruh serta mengecam penindasan oleh para penguasa lokal. Sebaliknya, sastrawan Manikebu, melalui karya Hartojo Andangjaja dan Taufiq Ismail, lebih banyak mengarahkan kritik pada otoritarianisme negara, pembungkaman suara kritis, dan penggerusan nilai-nilai demokrasi.

Penerapan metode penelitian sejarah dalam kajian ini memperkuat pembacaan puisi tidak hanya sebagai produk sastra, melainkan juga sebagai dokumen sosial-historis yang merekam realitas zamannya. Melalui pendekatan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, terbukti bahwa puisi-puisi tersebut tidak berdiri dalam kekosongan, melainkan tumbuh dari pergolakan sosial-politik yang kompleks. Diperkuat oleh pemikiran tokoh seperti Kuntowijoyo, posisi puisi sebagai medium yang mampu merekonstruksi makna sosial sebuah peristiwa semakin kokoh. Karya-karya ini menyimpan nilai dokumentatif dan semangat zaman (*zeitgeist*) yang otentik.

Dengan demikian, puisi pada masa Demokrasi Terpimpin terbukti menjadi instrumen kuat dalam menjaga kesadaran kolektif dan mengontrol penyimpangan kekuasaan. Para penyair pada masa itu adalah bagian dari sejarah perjuangan intelektual bangsa yang patut dihargai atas keberanian mereka menyuarakan kebenaran di hadapan rezim. Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai peran sastra dalam krisis politik lainnya dalam sejarah Indonesia,

sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi kini untuk tidak ragu menggunakan karya sastra sebagai alat penyadaran sosial dalam menegakkan nilai-nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z. (1997). *Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia*.
- Adiyanti, R. M., Saadie, M. M., & Agustiniingsih, D. D. (2021). Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Negeri Terluca Karya Saut Situmorang. *Jurnal Bahtera Sastra Indonesia*, 3(1).
- Al Fikry, M. F., Mustamar, S., & Pudjirahardjo, C. (2019). Mantra Petapa Alas Purwo: Kajian Semiotika Riffaterre. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 20(2), 108-119.
- Andangdjaja, H. (2014). *Aku*. Pawon.
- Anwar, S. (2012). Analisis Unsur Intrinsik dalam Kumpulan Puisi 6 Tirani dan B enteng" Karya TaufiqIsmail.
- Ardika, I. W. (2020). *Asiknya menulis puisi*. Grapena Karya.
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14-14.
- Arta, K. S. (2022). Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. *Jurnal Candra Sangkala*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1>
- Gie, S. H. (2011). *Catatan Seorang Demontran*. LP3ES.
- Grinter, A. (2017). Narrative And History: Hayden White's Objections To Scientific Changes to The Study Of History. In *The Journal of Natural and Social Philosophy* (Vol. 13, Issue 1). www.cosmosandhistory.org
- Harimurti, A. (2018). Agam Wispi: Sastra untuk manusia. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(1).
- Hasmiyatni, D. M., Herlina, L., & Anwar, R. (2024). Pemaknaan Heuristik, Hermeneutik, Dan Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Pahlawan dan Tikus Karya A. Mustofa Bisri: Kajian Semiotika. In *Suara Bahasa: Journal of Language* (Vol. 2).
- Hidayat, A. (2022). Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(1).
- Jassin, H. B. (2018). *Chairil Anwar Pelopor Angkatan '45*. Narasi.
- Jassin, H. B. (2013). *Angkatan 66: prosa dan puisi*. Dunia Pustaka Jaya.
- Juwati, J. (2017). Diksi dan gaya bahasa puisi puisi kontemporer karya Sutardji Calzoum Bachri, sebuah kajian stilistik. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 1(1), 72-89.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. 69-82.
- Lubis, N. A., Aini, R. A., & Raja, R. S. R. L. (2025). Kritik Sosial Terhadap Kapitalisme: Analisis Puisi di Negeri Amplop Karya Mustofa Bisri dalam Teori Karl Marx. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 1, 414-420.
- Mohamad, G. (2011). *Marxisme seni pembebasan*. Tempo Publishing.
- Mohamad, G. (2018). *Seni, Politik, Pembebasan*. IRCiSoD.
- Nasirin, A. A., & Abdurakhman, A. Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(1), 27-38.
- Nuha, K., Oktalia, P., & Karkono, K. (2022). Kompleksitas Kritik Sosial dalam Puisi Kita adalah Pemilik Sah Republik Ini Karya Taufik Ismail dan Sajak Pertemuan Mahasiswa Karya WS. Rendra. *Journal of Language, Literature, and Arts*, 2(4), 469-480.
- Pamungkas, J., Sujarwo, S., Cahya Rahmawati, S., Anggraeni, E. P., & Lathifah, W. (2022). Analisis Materi Tembang Macapat Sebagai Alternatif Rintisan Desa Budaya Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul. *Journal of Comprehensive Science*, 1(2), 40-44.
- Pradita, L. A. (2015). *Nilai Religiusitas dalam Kumpulan Puisi Doa untuk Anak Cucu Karya WS Rendra dengan Pendekatan Pragmatik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Pratiwi, D. A., Safitri, I., & Farika, L. (2019). Kritik sosial dalam kumpulan puisi ws rendra: kehidupan masyarakat di indonesia. *Cakrawala Linguista*, 1(2), 59-67.
- Puisi: Internasional (Karya Goenawan Mohamad). (2025, April 8). Sepenuhnya.
- Puisi: Petani, Tanah, dan Sumber Kehidupan. (2016, September 24). Boemi Mahardika.
- Puisi: Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah (Karya Sabar Anantaguna). (2024, September 23).
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. 18 Nomor 2, 251–264. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/1>
- Rahayu, I., & Susilawati, E. (2022). Realisme Sosial dalam Potret Seorang Komunis Karya Sabar Anantaguna. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*.
- Rosa, F., Hermita, N., & Samsudin, A. (2017). *Karya sastra melayu riau*. Deepublish.
- Rosid, A. (2024). *Analisis Kritis Atas Respon Taufiq Ismail Terhadap Kondisi Sosial Politik Dalam Kumpulan Puisi Tirani dan Benteng Tahun 1960-1966*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rustamana, A., Zahwan, A. H., Hilmani, F., Selma, A., & Narendra, D. (2024). Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Penelitian Sejarah. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5(6), 1–10. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Sambodja, A. (2010). *Historiografi Sastra Indonesia 1960an*. Bukupop.
- Santosa, P. (2022, January 22). *Kritik Postkolonial: Jaringan Sastra atas Rekam Jejak Kolonialisme*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Supartono, A., & Kebudayaan, P. (2000). *Lekra vs Manikebu*. Jakarta: STF Driyakarya.
- Susanti, N., Supriatna, N., & Sumantri, Y. K. (2019). *Lekra VS Manikebu: Perlawanan Majalah Sastra terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)*.
- Wachid, A. (2023). *Dinamika puisi Indonesia*. BasaBasi.
- Wahyuni, A. A. A. R., & Banda, M. M. *DI BALIK PELARANGAN BUKU*.
- Waluyo, J. Herman. (1987). *Teori dan Apresiasi Puisi*. Penerbit Erlangga.
- Yuliantoro, A. (2024). *Pengajaran Apresiasi Puisi*. Penerbit Andi.
- Zulfikar, M. F., Marwan, I., Saryono, D., & Syahri, M. (2023). TURBA SASTRAWAN LEKRA DALAM RESISTENSI KELAS PEKERJA: HISTORIOGRAFI SASTRA INDONESIA PERIODE 1960-AN. *Magistra Andalusia: Jurnal Ilmu Sastra*, 5(2).